

4

KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA

Oleh :

Apep Risman, Budhi Wibhawa, & M. Fedryasyah

Email :

apeprisman@yahoo.co.id

Abstrack

kemiskinan dipandang sebagai masalah sosial yang belum terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut tersebar dari wilayah perkotaan sampai perdesaan, akan tetapi wilayah perdesaan yang faktanya memiliki luas wilayah yang lebih besar ternyata masih memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi seperti ini memerlukan penanganan yang serius dari berbagai pihak, karena jika dibiarkan masyarakat perdesaan akan kehilangan keberfungsian sosialnya.

Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pembangunan di sektor pariwisata menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengurai masalah kemiskinan ini. Khusus untuk daerah perdesaan program pembuatan desa wisata menjadi salah satu program yang patut dikedepankan. Karena, pariwisata mempunyai dampak pengganda yang besar terutama dengan industri kreatif seperti berkembangnya industri kuliner, seni pertunjukan, desain, ataupun fashion.

Pengembangan potensi kesenian dan budaya lokal adalah salah satu bentuk desa wisata yang coba dikembangkan di Indonesia. Karena memasuki era globalisasi sekarang ini muncul kecenderungan bahwa masyarakat ingin memahami kebudayaan diluar lingkungannya. Keanekaragaman budaya Indonesia dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk mengenal persamaan dan perbedaan satu kebudayaan masyarakat dengan kebudayaan yang lainnya. Akan tetapi pengembangan pariwisata budaya saat ini kecenderungannya harus tetap diarahkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang pada praktiknya dapat memberikan ruang luas untuk partisipasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa Sukaratu merupakan salah satu desa di Cianjur yang telah di plot menjadi desa rintisan untu desa wisata dan budaya, keanekaragaman kesenian dan budaya lokal dapat dimodifikasi menjadi suatu pertunjukan yang bernilai tinggi untuk kemudian disuguhkan kepada para wisatawan. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan diharapkan akan dapat menjaga eksistensi keberadaan dari desa wisata yang berbasis pengembangan budaya lokal ini.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pariwisata, Pengembangan Desa Budaya

Abstrack

Poverty is seen as a social problem that has not been separated from the life of the Indonesian people. The condition is spread from urban areas to rural areas, but rural areas are in fact having a larger area still has a lower level of welfare than urban areas. Conditions such as these require serious treatment of the various parties, because if left rural communities will lose their social functioning.

Community empowerment through increased development in the tourism sector to be one alternative solution to parse this poverty problem. Especially for rural areas making program tourist village into one of the programs that should be put forward. Because, tourism has a large multiplier effect, especially with the development of creative industries like the culinary industry, performing arts, design, or fashion.

Potential development of local arts and culture is one of the tourist village that tried to be developed in Indonesia. As it enters the current era of globalization there is a tendency that people want to understand the culture outside environment. Indonesia's cultural diversity can be a main attraction for tourists to get to know the similarities and differences in the culture of the people with other cultures. However, the development of cultural tourism is now the trend should remain focused on the development of sustainable tourism, which in practice can provide a broad space for public participation and improvement of people's welfare.

Sukaratu village is a village in Cianjur who has been in pilot villages untu plot into a tourist village and culture, the arts and local cultural diversity can be modified into a high bernialai performances for later presented to the tourists. Sustainable tourism development is expected to be able to maintain the existence of the existence of a village-based tourism development of this local culture.

Keywords: Poverty, Tourism, Culture Village Developmen

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota tersebut terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan.

Desa dan kelurahan merupakan dua satuan pemerintah terendah dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satu pemerintah administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. (Hanif Nurcholis Dalam Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Jadi, kelurahan bukanlah badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroprasinya pelayanan pemerintahan kabupaten/kota. Sedangkan desa dengan statusnya sebagai badan hukum, maka memiliki kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan potensinya.

Data departemen dalam negeri tahun 2007 memperlihatkan bahwa jumlah desa di Indonesia adalah 65.189 desa, sedangkan kelurahan berjumlah 7.878 kelurahan (Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri, 2007). Data tersebut menggambarkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89% berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11% berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan.

Berdasarkan data tersebut juga memperlihatkan bahwa kedudukan desa sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional, desa dapat menjadi agen terdepan pemerintah dalam menjangkau sasaran riil yang hendak pemerintah sejahterakan. Sebagai lembaga pemerintah, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. kemudian sifat masyarakat desa yang masih guyub memungkinkan desa menjadi basis penanaman landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik ekonomi, sosial-budaya dan penerapan hukum dan ham yang stabil dan dinamis.

Posisi strategis desa yang dapat menjadi ujung tombak pemerinah dalam melaksanakan pembangunan nasional nyatanya sekarang

sedang dalam kondisi yang kurang baik. Menurut data dari Badan Pusat Statistika jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 237.641.326 jiwa yang tersebar di daerah perkotaan dan pedesaan dan BPS juga mencatat bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Pedesaan (% penduduk yg hidup di bawah garis kemiskinan desa)	20.0	21.8	20.4	18.9	17.4	16.6	15.7	14.3	14.4	13.8
Kemiskinan Kota (% penduduk yg tinggal di bawah garis kemiskinan kota)	11.7	13.5	12.5	11.6	10.7	9.9	9.2	8.4	8.5	8.2

Gambar 1. Sebaran Penduduk Miskin Antara Kota Dan Desa

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Data tersebut memperlihatkan kondisi pemerataan kesejahteraan daerah kota dan desa yang terlihat belum merata. Kondisi desa yang demikian sangat perlu didorong untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan, sehingga masyarakat dapat mencapai keberfungsian sosialnya.

Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2013 berpendapat bahwa salah satu solusi alternatif untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya bidang perekonomian adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata pedesaan yang berbasis pemanfaatan potensi lokal, baik itu potensi alam maupun keanekaragaman budayanya.

Solusi pariwisata tersebut diambil dengan asumsi bahwa pengembangan potensi pariwisata pada gilirannya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pariwisata mempunyai dampak pengganda yang besar terutama dengan industri kreatif, yang memang mempunyai hubungan sangat erat dengan pariwisata. Pariwisata dan ekonomi kreatif juga sektor yang pertumbuhannya inklusif karena nilai

tambahnya langsung dirasakan masyarakat lokal. Beberapa industri kreatif yang dapat berkembang beriringan dengan pembangunan wisata diantaranya seperti kuliner, seni pertunjukan, desain, ataupun fashion.

Kabupaten Cianjur adalah salah satu daerah yang berada di wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Daerah yang terkenal sebagai penghasil beras unggul di Jawa Barat ini, sekarang terkenal juga dengan pariwisata daerah pedesaannya. Menurut data yang ada di Disbudpar Kabupaten Cianjur, telah ada 9 desa yang sudah dapat dijadikan alternatif wisata dengan corak kebudayaan lokal yang menjadi kebanggaan masing-masing desa.

Desa Sukaratu merupakan salah satu desa yang sekarang sedang berkembang menjadi desa wisata yang berbasis pengembangan potensi budaya dan kesenian lokal. Desa Sukaratu termasuk desa yang dibangun atas dasar inisiatif warga masyarakat disana yang melihat potensi keanekaragaman budaya dan kesenian yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, diantaranya sebagai seperti : Tradisi kaulinan urang lembur (tradisional) seperti Jajangkungan, Sondah, Serseran, Wawayangan dan lain sebagainya.

Pengembangan Desa wisata dipandang sebagai salah satu bentuk pengembangan masyarakat (community development) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan pengembangan desa wisata tersebut. Herbert J. Rubin dan Irene S. Rubin dalam Lee J. Carry (1970 : 23) mendefinisikannya sebagai berikut:

‘Community Development involves local empowerment through organized groups of people acting collectively to control decisions, projects, program and policies that affect them as community’ (1992: 43).

Definisi tersebut menggambarkan bahwa pengembangan masyarakat menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan melalui kegiatan kolektif dari kelompok-kelompok yang terorganisasi untuk

mengontrol keputusan, proyek, program, dan kebijakan yang mempengaruhi mereka sebagai sebuah komunitas.

Model pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan pariwisata nampaknya dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan tersebut didapat melalui efek pengganda dari tumbuhnya sektor pariwisata yang beriringan dengan berkembangnya sektor ekonomi kreatif lain seperti : kuliner, seni pertunjukan, desain, ataupun fashion. Kemudian selain peningkatan kesejahteraan melalui sektor ekonomi tadi, pengelolaan pariwisata yang dilakukn secara kolektif oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat akan memicu timbulnya kohesifitas dan rasa kebanggaan terhadap hasil karya tangan mereka dalam membangun pariwisata di desa tersebut.

Dengan demikian, kesenjangan kesejahteraan yang terjadi antara kota dan desa lambat laun akan terkikis dengan adanya pengembangan pariwisata di wilayah pedesaan. Kemudian arus migrasi penduduk desa ke kota yang diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan juga dapat ditekan, yakni melalui penyediaan berbagai macam peluang usaha yang dapat mereka tawarkan kepada para wisatawan yang berkunjung kedesa mereka.

PEMBAHASAN DAN ISI

Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan untuk beberapa daerah sudah dapat menunjukkan hasil dari pengembangan industri pariwisata ini, mereka mampu mendongkrak pendapatan daerahnya melalui sektor pariwisata yang dikembangkan didaerahnya. Kabupaten Magelang adalah salah satu daerah yang

membuktikan itu, dari 20 desa yang berpotensi dikembangkan Desa Candirejo adalah desa yang berkembang sangat cepat. Berdasarkan data, pada tahun 2003 pendapatan koperasi mencapai Rp. 18,44 juta, 2009 Rp. 202,29 juta¹

Pentingnya industri pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan suatu daerah, tidak terlepas dari kenyataan bahwa :

1. Pariwisata merupakan sektor jasa yang inheren dengan kehidupan masyarakat modern. Semakin tinggi
2. pendidikan dan ekonomi seseorang atau masyarakat, maka kebutuhan terhadap pariwisata akan semakin besar pula.
3. Pariwisata mempunyai kekuatan sinergetik karena keterkaitan yang erat sekali dengan berbagai bidang dan sektor lainnya. Pariwisata akan berkembang seiring dengan perkembangan transportasi, telekomunikasi, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya.
4. Tumpuan pariwisata sebagai kekuatan daya saing terletak pada sumber daya yang terolah dengan baik²

Pariwisata (ecotourism) merupakan salah satu bentuk industri pariwisata yang belakangan ini menjadi tujuan dari sebagian besar masyarakat. Pariwisata memberikan “suguhan” kepada wisatawan berupa keindahan alam seperti air terjun, pegunungan, alam bawah laut dan bernagai macam atraksi seni dan budaya.

Dalam beberapa tahun terakhir kontribusi sektor pariwisata sungguh sangat meyakinkan. Kontribusinya sangat terasa ketika perekonomian nasional sedang mengalami krisis global dengan penerimaan ekspor turun tajam. Pada sektor Pariwisata justru pada tahun 2013 mengalami

¹ <https://id.scribd.com/doc/258488296/Desa-Wisata-Sebagai-Usaha-Memerangi-Kemiskinan-Di-Pedesaan>
diakses 10 Mei 2015, 14:57 wib

² Anonim, 2003, Proposal Workshop Wisata Petualangan dan Ekoturisme halaman 2

peningkatan 10% menjadi 17% dari total ekspor barang dan jasa dengan penghasilan 10 Milyar USD. Sementara itu, untuk kontribusi langsung terhadap Penghasilan Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai angka 3,8% dan jika memperhitungkan efek penggandaannya, kontribusi pariwisata pada PDB mencapai 9%. Kemudian dalam penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 10,18 juta orang atau 8,9% dari total jumlah pekerja, sehingga sektor pariwisata dapat termasuk kedalam 4 sektor yang dapat menyerap tenaga kerja.³

Pariwisata adalah potensi yang sangat banyak dikembangkan oleh daerah-daerah di setiap negara. Pariwisata sendiri bukan hanya tentang kawasan wisata di daerah tersebut, tetapi pariwisata juga bisa meningkatkan dan mengembangkan industri kreatifitas dan penyediaan jasa yang ada di negara tersebut. Dalam hal ini, Pariwisata juga berpengaruh dalam meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi di daerah dan di negara tersebut.

Maka tidak heran jika United Nation World Tourism Organization atau UN-WTO menyatakan bahwa “kemajuan sektor pariwisata mampu mengatasi kemiskinan. Pengelolaan pariwisata yang baik akan menguntungkan bagi para perajin souvenir hingga operator perjalanan wisata”. Pernyataan tersebut dinyatakan dalam International Conference on Cultural Tourism and Local Communities” di Yogyakarta, Rabu (8/2/2006).⁴ Kemudian Aburizal Bakrie selaku Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada saat itu dalam pidato sambutannya dalam forum tersebut menyatakan bahwa pariwisata adalah lokomotif global dalam peningkatan PDB dan penciptaan lapangan kerja. Sebab, pariwisata memiliki kekuatan multidimensi bagi masyarakat. Sektor pariwisata juga turut kontribusi sebesar 19 persen dari pendapatan nasional. Bukan hanya dari sektor tiket perjalanan dan hotel, tetapi juga souvenir dan penerimaan dari daerah tujuan wisata.

³ <http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?id=2555>
diakses 28 april 2015, 22:57 wib

Melihat peluang pariwisata yang begitu besar tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan pengembangan 561 desa wisata pada 2014. Sehingga hal tersebut mulai direspon oleh berbagai daerah di Indonesia untuk ikut mensukseskan target dari Kemenkraf tersebut. Kondisi pembangunan antara kota dan desa yang belum merata dinilai menjadi sebuah peluang untuk dapat mengembangkan potensi pariwisata pedesaan, sehingga pada gilirannya dapat mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistika jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 237.641.326 jiwa yang tersebar di daerah perkotaan dan pedesaan dan BPS juga mencatat bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang.

Gambar 2. Sebaran Penduduk Miskin Antara Kota Dan Desa

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Pedesaan (% penduduk yg hidup di bawah garis kemiskinan desa)	20.0	21.8	20.4	18.9	17.4	16.6	15.7	14.3	14.4	13.8
Kemiskinan Kota (% penduduk yg tinggal di bawah garis kemiskinan kota)	11.7	13.5	12.5	11.6	10.7	9.9	9.2	8.4	8.5	8.2

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Berangkat dari data tersebut, pengembangan potensi desa sangatlah diperlukan untuk dapat memperpendek jarak antara kesenjangan kesejahteraan masyarakat desa dan kota.

Dukungan pemerintah dalam rencananya memangkas jarak kesenjangan kesejahteraan desa dan kota dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang tersebut berisi tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas menyatakan adanya pengembangan otonomi

⁴<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F18517/Pariwisata%20Mampu%20Atasi%20Kemiskinan.htm>

daerah yang luas dari pemerintah pusat ke pemerintah propinsi dan kabupaten/kota menyebabkan terjadinya pengalokasian tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan yang selama ini terkonsentrasi di pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana peran dan keterlibatan masyarakat akan semakin dominan.⁵

Kemudian didukung pula dengan diterbitkannya Undang-undang tentang desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa membuat setiap desa akan mendapatkan dana maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah per desa setiap tahunnya. Dalam PP tersebut disebutkan pula bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁶

Adanya alokasi dana tersebut seharusnya dapat menjadi stimulus bagi pemerintahan desa yang pada dasarnya mempunyai kewenangan otonom untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, serta membentuk kesadaran masyarakat untuk mengolah potensi wisata yang ada sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan obyek wisata. Setiap desa harus didorong untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi wisatanya masing-masing seperti keindahan alam yang dimiliki, keragaman budaya serta tatanan kehidupan masyarakatnya. Dana desa yang berasal dari bantuan pusat maupun daerah juga dapat didayagunakan untuk membiayai pengembangan desa wisata, membenahi objek wisata atau melakukan promosi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Pemerintah sangat yakin terhadap potensi yang akan di dapat dari sektor

pariwisata ini, karena pariwisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena karakteristiknya yang khas sebagai berikut⁷ :

1. Konsumen datang ke tempat tujuan sehingga membuka peluang bagi penduduk lokal untuk memasarkan berbagai komoditi dan pelayanan
2. Membuka peluang bagi upaya untuk mendiversifikasikan ekonomi lokal yang dapat menyentuh kawasan-kawasan marginal
3. Membuka peluang bagi upaya usaha-usaha ekonomi padat karya yang berskala kecil dan menengah yang terjangkau oleh kaum miskin
4. Tidak hanya tergantung pada modal, akan tetapi juga tergantung pada modal budaya (cultural capital) dan modal alam (natural capital) yang seringkali merupakan aset yang dimiliki oleh kaum miskin

Pengembangan pariwisata pedesaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa tersebut. Keberadaan potensi sumber daya alam dan budaya yang unik dapat menjadi modal dalam pembentukan produk pariwisata pedesaan. Seperti pembuatan kawasan desa Culture Tourism, Ecotourism, Marine And Coastal Tourism, Farm-Tourism, Health Tourism, Creative Tourism Dan nature/Wildlife Tourism.

DESA SUKARATU MENJADI RINTISAN DESA WISATA DAN BUDAYA

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif di Masa kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 mulai menggalakan pembangunan di sektor pariwisata, hal ini disebabkan karena adanya multipel efek yang

⁵ TIMANG SETYORINI. 2004. dalam tesis "kebijakan pariwisata dalam rangka Meningkatkan pendapatan ekonomi Masyarakat kabupaten semarang"

⁶ <http://apbnnews.com/kawal-apbn/alokasi-dana-desa-2015/#ixzz3Zj2uquGX> diakses 10 mei 2015 17:17 wib.

⁷ Tjokrowinoto, M. 2005. Pengurangan Kemiskinan Melalui Pariwisata: Perspektif Kebijakan Publik. Dalam Damanik, J., H.A. dan Raharjana, D.T (Ed). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata. Yogyakarta: Kepel Press:53

terjadi ketika kegiatan pariwisata tersebut dijalankan. Sektor perekonomian lain mulai berjalan beriringan sejalan dengan perkembangan pariwisata ini diantaranya bisnis kuliner, sovenir dan jasa.

Pengembangan pariwisata pedesaan mulai mencuat ke permukaan setelah adanya program PNPM Mandiri Pariwisata. Melalui program ini berbagai desa yang memiliki potensi dan menarik untuk dikembangkan mulai dilirik oleh pemerintah untuk selanjutnya dikembangkan menjadi desa wisata. Potensi yang dikembangkan tidak hanya potensi alam, tapi potensi budaya dan kesenian lokal juga tidak luput dari perhatian pengembangan.

Desa Sukaratu merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, kini Desa Sukaratu sudah diplot menjadi salah satu desa rintisan desa wisata dan budaya di Kabupaten Cianjur. Hal itu tidak berlebihan karena pada kenyataannya desa ini telah berhasil melestarikan budaya dan 22 jenis kaulinan lembur yang kini terus dipertahankan di Desa Sukaratu agar tidak punah, selain itu kaulinan orang lembur bisa jadi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Gambar 3. Pertunjukan Permainan Tradisional



Sumber: www.kabarcianjur.com

Para pengunjung yang datang berkunjung ke Desa Sukaratu akan langsung disugahi oleh berbagai kegiatan, mulai wisata ke cagar budaya, kuliner dan kaulinan urang lembur. Para pengunjung juga diajari cara-cara membuat makanan urang lembur seperti membuat comro, gegetuk, bugis dan lain

sebagainya. Kemudian disana juga telah terdapat rumah sehat lingkungan. Rumah ini disediakan untuk para pengunjung sebagai tempat menginap dan beristirahat.

Daya tarik kesenian dan budaya masyarakat warga Desa Sukaratu pada kenyataannya telah berhasil menarik para wisatawan yang berkunjung kesana, Pariwisata budaya yang digagas disana pada intinya merupakan jenis pariwisata yang menawarkan kebudayaan yang berupa atraksi budaya baik yang bersifat tangibel atau konkret maupun intangibel atau abstrak, juga yang bersifat living culture (budaya yang masih berlanjut) dan cultural heritage (warisan budaya masa lalu), sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan wisatawan.

Dalam living culture, unsur-unsur yang bisa dijadikan sebagai daya tarik antara lain tradisi suatu suku bangsa tertentu, upacara dan ritual keagamaan, seni pertunjukan, dan sebagainya. Sedangkan dalam cultural heritage, daya tarik yang ditawarkan dapat berupa benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, lansekap budaya, dan sebagainya.

Dalam era global sekarang ini muncul kecenderungan bahwa masyarakat ingin memahami kebudayaan diluar lingkungannya. Menurut James J. Spillane (2003) bahwa produk pariwisata budaya memiliki segmen pasar khusus yaitu para "knowledge workers" atau dalam istilah kepariwisataan disebut "mature tourist" atau wisatawan yang berpengalaman dimana mereka melakukan perjalanan atau kunjungan ke kawasan lain dengan tujuan tidak hanya bersifat recreational tetapi lebih bermotivasi untuk menimba pengalaman melalui keterlibatan langsung dengan aktivitas kehidupan dan tradisi serta budaya masyarakat lokal.

Berdasarkan ketentuan Organisasi Pariwisata Dunia (WTO), kecenderungan pariwisata budaya sekarang diarahkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang memberikan ruang luas untuk partisipasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat, aktivitas

pariwisata budaya menumbuhkan lapangan kerja mulai dari pelayanan hotel, restoran, cendera mata, perencanaan perjalanan, dan pramuwisata (tour guide). Tidak hanya itu saja, kegiatan pariwisata juga memerlukan pula adanya prasarana ekonomi jalan, jembatan, terminal pelabuhan, lapangan udara, fasilitas umum, fasilitas olahraga, kantor pos dan telekomunikasi, bank, money changer, perusahaan asuransi, advertising agent, percetakan dan banyak sektor perekonomian lainnya, yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.

Kebudayaan merupakan segala hal yang berlangsung dan terjadi di sekitar lingkungan kita. Kebudayaan juga merupakan ciri khas masyarakat satu dengan yang lain, yang terbentuk dari rangkaian proses adaptasi lingkungan dan evolusi budaya. Perbedaan kebudayaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya inilah yang di kemudian hari menimbulkan adanya keinginan suatu masyarakat untuk mengenal kebudayaan yang lainnya. Di saat yang lain, dengan munculnya industrialisasi pariwisata, telah mendorong pengembangan pariwisata budaya di berbagai negara. Namun di balik itu semua, agaknya perlu disadari bahwa pengembangan pariwisata budaya juga harus memperhatikan unsur kelestarian dan keberlanjutan kebudayaan tersebut.

PENUTUP

Permasalahan pengembangan dan promosi pariwisata, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dinilai semakin penting untuk mendukung pembangunan nasional. Demikian juga kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia perlu mendapat perlindungan serta membutuhkan upaya pelestarian agar dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat menarik jumlah kunjungan wisata baik domestic maupun manca negara.

Nilai strategis budaya lokal telah menginspirasi berbagai daerah untuk mengembangkan potensi lokalitas dalam pengembangan pariwisata. Dengan berbagai

pertimbangan tersebut di atas, maka pengembangan pariwisata tidak boleh meminggirkan budaya dan spirit lokal. Oleh karena itu perlu digagas pengembangan pariwisata yang sejalan dengan pengembangan budaya dan semangat manusia beserta cipta, rasa dan karsanya. Gagasan tersebut dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pembangunan daya tarik wisata yang didasarkan pada pembangunan masyarakat dan budayanya.

Oleh karena itu penyediaan sarana transportasi, penginapan dan infrastruktur yang lain jangan sampai merusak eksotisme alam dan manusia yang hidup di dalamnya. Demikian juga pengembangan pariwisata di suatu daerah harus memberi jaminan rasa aman bagi pendatang karena kearifan budaya lokal merupakan suatu hal yang berharga dan eksotis. Keramahmatan penduduk merupakan daya tarik wisata yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, demikian juga kehidupan masyarakat ketika berinteraksi dengan alam dan tuhan mereka merupakan atraksi pariwisata yang memikat dan menawan hati.

SARAN

Dalam rangka memerangi kemiskinan, sektor pariwisata nampaknya dapat diandalkan untuk dapat menjadi solusi alternatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah dengan kapasitasnya sebagai pemegang regulasi dapat terus mendorong pelibatan masyarakat untuk ikut langsung berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan. Kemudian penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk dapat menjadi agent of change dalam masyarakat, supaya potensi yang ada di masyarakat dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Achlis, 1988. Masyarakat dan Kebudayaan. Bandung: STKS Bandung.
- Edi Suharto, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama
- Wibhawa, Budhi. Dkk. 2010. Dasar-dasar Pekerjaan sosial. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga
- Burhan. Bungin 2007. Penelitian kualitatif. Prenada Media Group: Jakarta
- Anonim, 2003, Proposal Workshop Wisata Petualangan dan Ekoturisme halaman 2
- Tjokrowinoto, M. 2005. Pengurangan Kemiskinan Melalui Pariwisata: Perspektif Kebijakan Publik. Dalam Damanik, J., H.A. dan Raharjana, D.T (Ed). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata. Yogyakarta: Kepel Press:53
- TIMANG SETYORINI. 2004. dalam tesis “kebijakan pariwisata dalam rangka Meningkatkan pendapatan ekonomi Masyarakat kabupaten semarang”
<https://id.scribd.com/doc/258488296/Desa-Wisata-Sebagai-Usaha-Memerangi-Kemiskinan-Di-Pedesaan> diakses 10 Mei 2015, 14:57 wib
- <http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?id=2555> diakses 28 april 2015, 22:57 wib
- <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F18517/Pariwisata%20Mampu%20Atasi%20Kemiskina> diakses 10 mei 2015 17:17 wib.
- <http://apbnnews.com/kawal-apbn/alokasi-dana-desa-2015/#ixzz3Zj2uquGX> diakses 10 mei 2015 17:17 wib.